

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut Maulida, dkk (2021) perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang menjual produknya dari proses produksi yang tidak terputus yaitu dari pembelian bahan baku, proses pengolahan bahan hingga menjadi produk yang siap untuk dijual. Hal tersebut dilakukan sendiri oleh perusahaan, sehingga membutuhkan sumber dana yang akan digunakan pada aktiva tetap perusahaan. Perusahaan manufaktur banyak membutuhkan sumber dari dana jangka panjang untuk membiayai operasi perusahaan mereka, salah satunya dengan investasi saham oleh investor. Dalam berinvestasi pada pasar modal, investor membutuhkan informasi yang dapat menjelaskan kinerja perusahaan pada saat ini dan di masa lalu. Informasi ini dapat dilihat pada laporan keuangan perusahaan.

Simanjuntak (2021) mengatakan bahwa laporan keuangan salah satu sumber informasi mengenai kondisi dan kinerja suatu perusahaan bagi pihak eksternal. Informasi tersebut menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan, dan bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas karena investor adalah pihak yang paling membutuhkan laporan keuangan.

Untuk mencapai tujuannya laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut Kasmir (2013:7) laporan keuangan itu harus menunjukkan kondisi keuangan saat ini atau periode kedepannya. Tujuannya untuk menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenar-benarnya. Agar manfaat laporan keuangan dapat di rasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan seperti pihak perusahaan. Pihak ini sangat berkepentingan untuk mengetahui laporan keuangan, karena laporan tersebut dapat menilai sukses tidaknya manajer dalam memimpin perusahaan. Salah satu elemen penting dalam laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen adalah laba.

Menurut Simanjuntak (2021) terkait dengan informasi laba, *statement of financial accounting concept* (SFAC) No 1, Informasi laba merupakan perhatian utama untuk menaksir kinerja atau pertanggung jawaban manajemen. Selain itu informasi laba juga membantu pemilik atau pihak lain dalam menaksir earning power perusahaan di masa yang akan datang. Oleh karena itu manajemen mempunyai

kecenderungan melakukan tindakan untuk memberikan laporan keuangan yang atraktif. Sehingga informasi laba sering menjadi target rekayasa tindakan manipulasi laba (*opportunistic management*) untuk memaksimalkan kepuasan manajer, tetapi akan merugikan pemegang saham atau investor. Tindakan kepentingan manajer tersebut dilakukan dengan cara memilih kebijakan akuntansi tertentu, sehingga laba perusahaan dapat diatur, dinaikkan maupun diturunkan sesuai dengan keinginannya.

Maulida dkk (2021) mengatakan bahwa, informasi dari laporan keuangan tidak selamanya akurat, manajer selaku pengelola perusahaan terkadang melakukan intervensi di dalam pelaporan laporan keuangan atas insentif tertentu. Manajer melakukan penyesuaian pada laporan keuangan agar laporan tampak baik sehingga memunculkan persepsi publik yang positif tentang kinerja perusahaan yang akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan tersebut di pasar modal.

Menurut Savitri (2014) informasi laba juga sering menjadi target rekayasa melalui tindakan oportunistis manajemen untuk memaksimalkan kepuasannya, karena adanya kecenderungan pihak-pihak yang memperhatikan laba dan hal ini disadari oleh manajemen khususnya manajer yang kinerjanya diukur berdasarkan informasi laba tersebut. Ketika perusahaan tidak mencapai target laba yang diinginkan, maka manajemen akan melakukan modifikasi laba agar kinerja perusahaan terlihat lebih baik dari kondisi yang sebenarnya. Praktik ini sering disebut sebagai manajemen laba (*earning management*).

Menurut Febriyanti, dkk (2014) praktik manajemen laba (*earnings management*) telah menjadi isu dan fenomena umum di Indonesia. Hal demikian nampaknya cenderung selalu terjadi, mengingat akuntan dalam perusahaan

mempunyai tujuan khusus atau karena intervensi manajemen. Hal ini dimungkinkan karena akuntan memiliki kesempatan, kekuasaan dan pengetahuan untuk mengatur seberapa besar laba yang diinginkan. Selain itu, manajemen laba dimungkinkan pula oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dalam hal ini akuntan dapat mempengaruhi angka laba melalui pemilihan metode atau kebijakan akuntansi yang diperbolehkan dalam SAK.

Setiorini, dkk (2017) menyatakan bahwa, salah satu motivasi manajer melakukan manajemen laba adalah motivasi pajak. Pada prinsipnya manajemen laba merupakan metode yang dipilih dalam menyajikan informasi laba kepada publik yang telah disesuaikan dengan kepentingan dari pihak manajer atau menguntungkan pihak perusahaan dengan cara menaikkan atau menurunkan laba perusahaan. Hal ini dapat dijelaskan karena dasar pengenaan pajak adalah jumlah penghasilan kena pajak yang dilaporkan oleh perusahaan maka perusahaan cenderung menjaga labanya pada level tertentu (Tiaras dan Wijaya, 2015), sehingga dapat diprediksi bahwa perusahaan dengan tingkat pendapatan yang cenderung meningkat akan melakukan income decreasing. Sebaliknya, jika perusahaan dengan tingkat pendapatan yang cenderung menurun diprediksikan akan melakukan income increasing untuk menghindari pemeriksaan pajak karena melaporkan kerugian.

Oleh karena itu, perusahaan di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan berpedoman pada PSAK dan Peraturan Perpajakan. Dalam menyiapkan laporan keuangan manajemen membutuhkan penilaian dan perkiraan. Hal ini memberikan manajemen fleksibilitas dalam menyusun laporan keuangannya. Fleksibilitas penyusunan laporan keuangan diatur dalam Pedoman Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK) No. 1 tentang penyajian laporan keuangan dengan pendekatan akrual (*accrual basic*). Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tahun 1997 menerbitkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 46 yang mengatur tentang akuntansi pajak penghasilan (PPh) yang mulai diterapkan pada 2001. Sebelum diberlakukannya PSAK No. 46 tersebut, perusahaan hanya menghitung dan mengakui besarnya beban pajak penghasilan untuk tahun berjalan saja tanpa menghitung dan mengakui pajak tangguhan.

Menurut PSAK00 Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 31-32 kondisi dimana laporan keuangan agar bermanfaat, informasi harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakekat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Misalnya, jika keabsahan dan jumlah tuntutan atas kerugian dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi perusahaan untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam neraca, meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut.

Di Indonesia kasus praktik manajemen laba bukanlah hal baru, sebagai contoh Lembaga Tax Justice Network pada Rabu melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya

negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan.

Pertama, pinjaman Intra-perusahaan. Bentoel banyak mengambil pinjaman antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan terkait di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia. Rothmans Far East BV juga memberikan pembiayaan kepada beberapa anak perusahaan BAT dan terlibat dalam pemasaran rokok di Jepang dan Korea. Diketahui, Rothman Far East BV bukan murni perusahaan di atas kertas, jumlah karyawannya terbilang kecil yakni tiga orang di luar Belanda dan beberapa pekerjaan lainnya dilakukan oleh staf perusahaan BAT lainnya. Fasilitas pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp 5,3 triliun atau setara US\$ 434 juta pada Agustus 2013 dan Rp 6,7 triliun atau setara US\$ 549 juta pada 2015.

Rekening perusahaan Belanda ini menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan kepada Bentoel berasal dari perusahaan grup BAT lainnya yaitu Pathway 4 (jersey) Limited yang berpusat di Inggris. Pinjaman dari Jersey ke Belanda diberikan dalam mata uang rupiah yang menjelaskan bahwa uang itu untuk dipinjamkan ke Bentoel. Bentoel harus membayar total bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun setara US\$ 164 juta. Bunga ini akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Secara rinci pembayaran bunga utang pada tahun 2013 sebesar US\$ 6,3 juta, tahun 2014 sebesar US\$ 43 juta, tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar US\$ 68,8 juta

dan US\$ 45,8 juta. Hal ini diakui perusahaan melalui laporan tahunan 2016 dengan mengatakan kerugian bersih meningkat 27,3%. Hal ini menyebabkan perusahaan kehilangan dana operasional karena untuk membayar beban bunga utang.

BAT melakukan pinjaman yang berasal dari Jersey melalui perusahaan di Belanda terutama untuk menghindari potongan pajak untuk pembayaran bunga kepada non-penduduk. Indonesia menerapkan pemotongan pajak tersebut sebesar 20%, namun karena ada perjanjian dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%. Sedangkan pinjaman asli tidak langsung dari perusahaan di Jersey karena Indonesia dan Inggris tidak memiliki perjanjian serupa. Indonesia-Inggris memiliki perjanjian dengan penetapan tarif pajak atas bunga sebesar 10%. Dari strategi tersebut maka Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Pasalnya dari utang US\$ 164 juta Indonesia harusnya bisa mengenakan pajak 20% atau US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta per tahun. Meskipun pada akhirnya Indonesia-Belanda merevisi perjanjian mereka dengan memperbolehkan Indonesia mengenakan pajak sebesar 5%. Namun aturan tersebut baru berlaku pada Oktober 2017 yang berarti Bentoel telah selesai melakukan transaksi pembayaran bunga utang.

Kedua, pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan Bentoel melakukan pembayaran untuk royalti, ongkos dan biaya IT dengan total US\$ 19,7 juta per tahun. Biaya tersebut digunakan untuk membayar royalti ke BAT Holdings Ltd untuk penggunaan merek Dunhill dan Lucky Strike sebesar US\$ 10,1 juta, membayar ongkos teknis dan konsultasi kepada BAT Investment Ltd sebesar US\$ 5,3 juta, dan membayar biaya IT British American Shared Services (GSD) limited sebesar US\$ 4,3 juta. "Dalam beberapa tahun terakhir, secara signifikan memperburuk

kerugian Bentoel di Indonesia. Biaya gabungan dari pembayaran ini setara dengan 80% dari kerugian perusahaan sebelum pajak pada tahun 2016," tulis laporan tersebut. Dengan demikian pajak perusahaan rata-rata atas pembayaran setiap tahun dengan suku bunga 25% sebesar US\$ 2,5 juta untuk royalti, US\$ 1,3 juta untuk ongkos, dan US\$ 1,1 juta untuk biaya IT.

Dengan adanya perjanjian Indonesia-Inggris maka potongan pajak untuk royalti atas merk dagang sebesar 15% dari US\$ 10,1 juta atau sebesar US\$ 1,5 juta. Sedangkan biaya layanan teknis tidak dikenakan pemotongan. Biaya IT tidak disebutkan dalam perjanjian, namun karena mirip dengan royalti, laporan tersebut mengasumsikan potongan pajak biaya IT sebesar US\$ 0,7 juta. Sehingga pendapatan yang hilang dari Indonesia mencapai US\$ 2,7 juta per tahun karena pembayaran royalti, ongkos dan biaya IT BAT kepada perusahaan-perusahaannya di Inggris. Adapun dengan rincian pajak royalti sebesar US\$ 1 juta per tahun, pajak perusahaan US\$ 1,3 juta per tahun dan pajak biaya IT sebesar US\$ 0,4 juta per tahun.

Kasus manajemen laba berikutnya yaitu dari PT Adaro Energy Tbk. Pihak Adaro menanggapi dugaan praktik pengalihan keuntungan seperti yang tertuang dalam laporan Global Witness berjudul *Taxing Time for Adaro*. Febriati Nadira, Head of Corporate Communication PT Adaro Energy Tbk. mengungkapkan perseroan sebagai perusahaan publik menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan patuh terhadap aturan yang berlaku, termasuk perpajakan. "Selama bertahun-tahun Adaro terpilih sebagai salah satu Wajib Pajak yang menerima apresiasi dan penghargaan atas kontribusinya terhadap penerimaan negara, patuh

terhadap peraturan perpajakan serta responsif," kata Febrianti dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis.com, Kamis (4/7/2019).

Febri menjelaskan, sebagai perusahaan nasional, Adaro berkomitmen untuk berkontribusi bagi pembangunan dan kemajuan ekonomi Indonesia melalui pembayaran pajak dan royalti. Adapun pada 2018 Adaro telah memberikan kontribusi kepada negara senilai total US\$721 juta (US\$ 378 juta dalam bentuk royalti dan US\$ 343 juta dalam bentuk pajak). Dia juga menyampaikan bahwa Coaltrade Services International Pte.Ltd merupakan salah satu perusahaan grup Adaro yang berbasis di Singapura untuk memasarkan batubara Adaro di pasar internasional (ekspor). Sehingga sebagai kantor pemasaran internasional, Coaltrade Services International Pte.Ltd berperan penting untuk memperluas pasar internasional dengan tetap berpegangan pada ketentuan Harga Patokan Batubara (HPB) serta aturan perpajakan dan royalti yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

Korporasi besar yang bergerak di sektor tambang batu bara, Adaro Energy disebut telah mengalihkan banyak keuntungan ke offshore network. Praktik ini kemudian memunculkan dugaan bahwa perusahaan tersebut tengah menghindari dan meminimalkan pembayaran pajak ke otoritas Indonesia. Dalam laporan yang dirilis berjudul *Taxing Times for Adaro*, Global Witness mengungkap bahwa dari 2009–2017 Adaro dengan memanfaatkan anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International, membayar US\$ 125 juta lebih sedikit daripada yang seharusnya disetorkan ke pemerintah Indonesia.

Dengan memindahkan lebih banyak uang melalui tempat-tempat bebas pajak, Adaro juga mungkin telah mengurangi tagihan pajak Indonesia, termasuk uang

yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk layanan-layanan publik yang penting, hampir \$14 juta per tahun. Manajer Kampanye Perubahan Iklim Global Witness Stuart McWilliam menyebut dengan jaringan operasi offshore yang sangat luas, kondisi sangat kontras dengan apa yang dicitrakan Adaro yang selama ini dianggap banyak memberikan kontribusi kepada pemerintah.

Bisnis.com mencatat, Adaro Energy merupakan salah satu wajib pajak (WP) besar yang dua tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan sebagai WP yang berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak. "Investigasi kami sebelumnya telah menunjukkan bahwa kegiatan tax haven dari perusahaan batubara Indonesia dapat menambah risiko keuangan terhadap dampak lingkungan yang berbahaya," kata Stuart dalam laporan yang dikutip Bisnis.com, Kamis (4/7/2019).

Adapun laporan keuangan menunjukkan bahwa nilai total komisi penjualan yang diterima Coaltrade dengan tarif pajak yang lebih rendah di Singapura meningkat dari rata-rata tahunan \$4 juta sebelum 2009 menjadi \$55 juta dari 2009-2017. Disamping itu, lebih dari 70 persen batu bara yang dijual berasal dari anak perusahaan Adaro di Indonesia. Peningkatan pembayaran ini mendorong keuntungan di Singapura, di mana mereka dikenakan pajak rata-rata tahunan 10 persen. Hal ini berbanding terbalik jika keuntungan dari komisi perdagangan batu bara Adaro Indonesia berada di Indonesia, yang menurut Stuart mungkin akan dikenakan pajak pada tingkat rata-rata tahunan yang lebih tinggi yaitu 50 persen.

Masih menurut laporan itu, pada 2008, Adaro membayar US\$33 juta untuk menyelesaikan perselisihan dengan otoritas pajak Indonesia atas pengaturan sebelumnya dengan Coaltrade. Sebagian besar dari keuntungan yang terdaftar di

Singapura tampaknya telah dipindahkan lebih jauh ke luar negeri, tepatnya ke salah satu anak perusahaan Adaro di surga pajak Mauritius, di mana dia tidak dikenakan pajak sama sekali sebelum 2017. Selain itu, laporan itu laporan tersebut juga menemukan bahwa Adaro baru-baru ini mengakuisisi anak perusahaan di surga pajak Malaysia yakni Labuan dan telah digunakan untuk membeli saham di tambang batu bara Australia. “Pada saat yang sama, Adaro telah memperluas jaringan offshore-nya, dia akan diuntungkan oleh jaminan keuangan pemerintah Indonesia untuk pembangkit listrik tenaga batu bara Batang senilai US\$4 miliar,” tulis laporan tersebut.

Kasus manajemen laba berikutnya Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura, yakni PT RNI, kini tengah menjalani proses pemeriksaan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus. Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, padahal memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia yakni di Jakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro memastikan perusahaan-perusahaan yang nakal dan tidak tertib kewajiban pajak, seperti PT RNI ini, akan dikenakan sanksi hukum. “2016 ini adalah tahun penegakan hukum, artinya kita tidak akan segan-segan melakukan *law enforcement* terhadap wajib pajak yang dianggap belum patuh atau melakukan kesalahan,” kata Bambang dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (6/4/2016). Modus yang umum dilakukan adalah perusahaan atau perseorangan datang ke suatu wilayah negara bukan untuk kepentingan pekerjaan, misalnya wisata. Bambang menuturkan, para pelancong asing ini terikat persyaratan tidak boleh bekerja atau mendapatkan penghasilan dari negara tujuan. Akan tetapi, kata dia, yang banyak terjadi di Indonesia khususnya di ibu kota adalah para pelancong

membuka praktik entah itu jasa kesehatan, kecantikan, dan sebagainya. Mereka barangkali menyewa apartemen atau rumah untuk memberikan layanan kepada pelanggan. “Tentunya pasien pelanggan itu datang dengan membayar jasa dari si ahlinya atau dokternya maupun obat-obatan atau kosmetik. Mungkin kalau dari kesehatan atau yang lain, mungkin perlu dicek ijinnya. Tapi, yang pasti dari kami Kemenkeu khususnya DJP, jelas kegiatan ini tidak akan masuk dalam kategori perusahaan yang akan membayar pajak,” tegas Bambang.

Dia lebih jauh menyampaikan, PT RNI adalah salah satu contoh dari kegiatan yang dimaksud. Namun yang menarik dari kasus ini adalah banyak modus mulai dari administrasi hingga kegiatan yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak. Secara badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya, pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. “Jadi, pemiliknya tidak nanam modal, tapi memberikan seolah-olah seperti utang, di mana ketika utang itu bunganya dibayarkan itu dianggap sebagai dividen oleh si pemilik di Singapura,” ungkap Bambang. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang mengurangi pajak, perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban. Apalagi, kata Bambang, jika dalam laporan keuangannya tercatat kerugian demikian besar. Praktis tidak ada pajak yang masuk ke negara.

Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar. “Jadi intinya dari segi laporan keuangan ini sudah tidak logis. Karena itulah oleh Kanwil DJP Khusus

dilakukan pemeriksaan,” kata Bambang. Modus lain yang dilakukan PT RNI yaitu memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1 persen. Memang kata Bambang, omzet PT RNI di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. “Tapi poin saya, kita tidak bisa menyalahkan aturannya yang kurang kuat. Tapi kita juga mempertanyakan etika dari di PMA ini. Udah PMA kok malah minta pajak UKM. Terakhir, dua pemegang saham PT RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak 2007-2015. Adapun dua pemegang saham, yang merupakan orang Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya, padahal memiliki usaha di Indonesia.

Dari beberapa fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa praktik manajemen laba untuk meminimalkan pajak dalam suatu perusahaan bukanlah suatu hal yang baru. Perusahaan memiliki berbagai cara untuk melakukan perencanaan pajak salah satunya dengan tindakan melakukan *transfer pricing*. Pajak diharapkan dapat membiayai negara demi kesejahteraan rakyat, namun fakta dilapangan masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak yang membuat penerimaan pajak tidak maksimal.

Berdasarkan penelitian terdahulu faktor-faktor yang diduga mempengaruhi manajemen laba adalah:

1. Faktor pertama adalah Aset Pajak Tangguhan yang diteliti oleh Lutfi M Baradja, Yuswar Zainul Basri, Vertari Sasmi (2017), Fatchan Achyani, Susi Lestari (2019), Lucy Citra Fitriany (2016), Sartika Sari Paul, Eduard Sudjiman (2021), Ainaul Maslihah (2019), Titi Andrayani Fitriyasuri, M.Titan Terzaghi (2018), Neng Priski Yulianti, Endah Finatarian (2021), Nunu Chahyani (2021), Fiqri Fadillah, Arief

Tri Hardiyanto, Abdul Kohar (2021), Septa Yulianah, Dwiyani Sudaryanti, Hariri (2021), Adibah Yahya, Dian Wahyuningsih (2019), Yuliana Maulida, Sri Hartiyah, Agus Putranto (2021), Owen De Pinto Simanjuntak (2021), Tan Rachel Kalinda, Lilis Setyowati (2021), Yogi Maulana Putra (2019), Siti Aminah dan Zulaikha (2019), Noorjannah Vira Astuti, Rachmawati Meita Oktaviani (2021), Diah Vitaloka Adam, Nur Siti Faridah (2022).

2. Faktor kedua adalah Ukuran Perusahaan yang diteliti oleh Titi Andrayani Fitriasuri, M.Titan Terzaghi (2018), Septa Yulianah, Dwiyani Sudaryanti, Hariri (2021), Ayu Yuni Astuti, Elva Nuraina, Anggita Langgeng Wijaya (2017), Dendi Purnama, SE, M.Si (2017), Marsheila Giovani (2017), Yofi Prima Agustia, Elly Suryani (2018), Dewi Kusuma Wardani, Desifa Kurnia Santi (2018), Enong Muiz, Heni Ningsih (2018), Eka Lestari, Murtanto (2017), Putu Tiya Mahawyahrti, I Gusti Ayu Nyoman Budiasih (2016), Siti Aminah dan Zulaikha (2019), Dea Savitri Ayu Lestari, Ia Kurnia, Yuniati (2018).
3. Faktor ketiga adalah Kinerja Perusahaan yang diteliti oleh Eka Lestari, Murtanto (2017)
4. Faktor Keempat adalah Beban Pajak Tangguhan yang diteliti oleh Lutfi M Baradja, Yuswar Zainul Basri, Vertari Sasmi (2017), Fatchan Achyani, Susi Lestari (2019), Ratna Eka Puji Astutik, Titik Mildawati (2016), Lucy Citra Fitriany (2016), Dita Rimbawati Dewi, Dian Anita Nuswantara (2021), Budi Setyawan, Harnovinsah (2016), Neng Priski Yulianti, Endah Finatarian (2021), Nunu Chahyani (2021), Yogi Saputra (2018), Rima Dwi Yanti, Suciati Muanifah (2021), Septa Yulianah, Dwiyani Sudaryanti, Hariri (2021), Novi Catur Prasetyo, Riana, Endang Masitoh

- (2019), Yuliana Maulida, Sri Hartiyah, Agus Putranto (2021), Owen De Pinto Simanjuntak (2021), Yogi Maulana Putra (2019), Arma Yuliza dan Ronia Fitri (2020), Diah Vitaloka Adam, Nur Siti Faridah (2022).
5. Faktor kelima adalah Leverage yang diteliti oleh Ainaul Maslihah (2019), Yogi Saputra (2018), Ayu Yuni Astuti, Elva Nuraina, Anggita Langgeng Wijaya (2017), Dendi Purnama, SE, M.Si (2017), Marsheila Giovani (2017), Yofi Prima Agustia, Elly Suryani (2018), Eka Lestari, Murtanto (2017), Putu Tiya Mahawyahrti, I Gusti Ayu Nyoman Budiasih (2016), Ayu Apriliani Hidayat, Ahmad Juanda, Ahmad Waluya Jati (2019).
 6. Faktor keenam adalah Perencanaan Pajak yang diteliti oleh Lutfi M Baradja, Yuswar Zainul Basri, Vertari Sasmi (2017), Fatchan Achyani, Susi Lestari (2019), Ratna Eka Puji Astutik, Titik Mildawati (2016), Lucy Citra Fitriany (2016), Sartika Sari Paul, Eduard Sudjiman (2021), Ainaul Maslihah (2019), Titi Andrayani Fitriasuri, M.Titan Terzaghi (2018), Dita Rimbawati Dewi, Dian Anita Nuswantara (2021), Budi Setyawan, Harnovinsah (2016), Neng Priski Yulianti, Endah Finatarian (2021), Nunu Chahyani (2021), Yogi Saputra (2018), Fiqri Fadillah, Arief Tri Hardiyanto, Abdul Kohar (2021), Rima Dwi Yanti, Suciati Muanifah (2021), Septa Yulianah, Dwiyani Sudaryanti, Hariri (2021), Adibah Yahya, Dian Wahyuningsih (2019), Novi Catur Prasetyo, Riana, Endang Masitoh (2019), Dewi Kusuma Wardani, Desifa Kurnia Santi (2018), Enong Muiz, Heni Ningsih (2018), Yuliana Maulida, Sri Hartiyah, Agus Putranto (2021), Tan Rachel Kalinda, Lilis Setyowati (2021), Yogi Maulana Putra (2019), Arma Yuliza dan

- Ronia Fitri (2020), Dea Savitri Ayu Lestari, Ia Kurnia, Yuniati (2018), Noorjannah Vira Astuti, Rachmawati Meita Oktaviani (2021).
7. Faktor ketujuh adalah Profitabilitas yang diteliti oleh Ainaul Maslihah (2019), Budi Setyawan, Harnovinsah (2016), Nunu Chahyani (2021), Dendi Purnama, SE, M.Si (2017), Marsheila Giovani (2017), Yofi Prima Agustia, Elly Suryani (2018), Yuniep Mujati Suaidah, Langgeng Prayitno Utomo (2018), Noorjannah Vira Astuti, Rachmawati Meita Oktaviani (2021).
 8. Faktor kedelapan adalah kepemilikan Institusional yang diteliti oleh Dendi Purnama, SE, M.Si (2017), Marsheila Giovani (2017), Eka Lestari, Murtanto (2017), Yusuf Mangkusuryo, A.Waluyo Jati (2017).
 9. Faktor kesembilan adalah Kepemilikan Manajerial yang diteliti oleh Fatchan Achyani, Susi Lestari (2019), Titi Andrayani Fitriyasuri, M.Titan Terzaghi (2018), Dendi Purnama, SE, M.Si (2017), Marsheila Giovani (2017), Enong Muiz, Heni Ningsih (2018), Yuniep Mujati Suaidah, Langgeng Prayitno Utomo (2018), Eka Lestari, Murtanto (2017), Yusuf Mangkusuryo, A.Waluyo Jati (2017).
 10. Faktor kesepuluh adalah Komisaris Independen yang diteliti oleh Yuniep Mujati Suaidah, Langgeng Prayitno Utomo (2018), Yusuf Mangkusuryo, A.Waluyo Jati (2017).
 11. Faktor kesebelas adalah Independensi Dewan Komisaris yang diteliti oleh Marsheila Giovani (2017).
 12. Faktor Keduabelas adalah Dewan Komisaris yang diteliti oleh Eka Lestari, Murtanto (2017).

13. Faktor ketiga belas adalah Ukuran Dewan Komisaris yang diteliti oleh Marsheila Giovani (2017).
14. Faktor keempat belas adalah Asimetri Informasi yang diteliti oleh Putu Tiya Mahawyahrti, I Gusti Ayu Nyoman Budiasih (2016), Ayu Apriliani Hidayat, Ahmad Juanda, Ahmad Waluya Jati (2019).
15. Faktor kelima belas adalah Corporate Social Responsibility (CSR) yang diteliti oleh Dewi Kusuma Wardani, Desifa Kurnia Santi (2018), Ni Luh Nia Ardiani, I Putu Sudana (2018).
16. Faktor keenam belas adalah Kualitas Audit yang diteliti oleh Rima Dwi Yanti, Suciati Muanifah (2021), Novi Catur Prasetyo, Riana, Endang Masitoh (2019), Eka Lestari, Murtanto (2017).
17. Faktor ketujuh belas adalah Komite Audit yang diteliti oleh Marsheila Giovani (2017), Yuniep Mujati Suaidah, Langgeng Prayitno Utomo (2018), Eka Lestari, Murtanto (2017), Yusuf Mangkusuryo, A.Waluyo Jati (2017),
18. Faktor kedelapan belas adalah Kepemilikan Terkonsentrasi yang diteliti oleh Eka Lestari, Murtanto (2017),), Siti Aminah dan Zulaikha (2019).
19. Faktor kesembilan belas adalah Konservatisme Akuntansi yang diteliti oleh Sri Ruwanti (2017).
20. Faktor kedua puluh adalah Free Cash Flow yang diteliti oleh Fatchan Achyani, Susi Lestari (2019).

24	Yuniep Mujati Suaidah, Langgeng Prayitno Utomo	2018	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-
25	Eka Lestari, Murtanto	201	-	✓	✓	-	✓	-	-	x	✓	-	-	x	-	-	-	x	x	✓	-	-
26	Ni Luh Nia Ardiani, I Putu Sudana	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
27	Yusuf Mangkusuryo, A. Waluyo Jati	2017	-	-	-	-	-	-	-	x	✓	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-
28	Sri Ruwanti	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
29	Putu Tiya Mahawyahrti, I Gusti Ayu Nyoman Budiasih	2016	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
30	Yuliana Maulida, Sri Hartiyah, Agus Putranto	2021	x	-	-	✓	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Owen De Pinto Simanjuntak	2021	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Tan Rachel Kalinda, Lilis Setyowati	2021	x	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Yogi Maulana Putra	2019	✓	-	-	✓	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Siti Aminah, Zulaikha	2019	✓	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
36	Arma Yuliza, Ronia Fitri	2020	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Dea Savitri Ayu Lestari, Ia Kurnia, Yuniati	2018	-	x	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Ayu Apriliani Hidayat, Ahmad Juanda, Ahmad Waluya Jati	2019	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-

39	Noorjannah Vira Astuti, Rachmawati Meita Oktaviani	2021	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Diah Vitaloka Adam, Nur Siti Faridah	2022	✓	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: data diolah oleh penulis, 2022

Keterangan:

Tanda ✓ = Berpengaruh

Tanda X = Tidak Berpengaruh

Tanda - = Tidak diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sartika Sari dan Paul Eduard Sudjiman (2021) dengan judul “Pengaruh Aktiva Pajak Tanggahan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018 – 2020”. Variabel-variabel yang diteliti yaitu aset pajak tanggahan dan perencanaan pajak sebagai variabel independen (bebas) dan manajemen laba sebagai variabel dependen (terikat). Lokasi penelitian dilakukan di Bursa Efek Indonesia tahun 2018– 2020. Unit analisis pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018– 2020 dan unit observasi pada penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dimana Sartika Sari dan Paul Eduard Sudjiman mengambil sampel pada 17 perusahaan manufaktur aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018– 2020 dengan kriteria: Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018– 2020. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah pada laporan keuangan. Perusahaan yang telah mempublikasikan

laporan keuangan tahunan selama periode 2018-2020. Perusahaan dengan informasi laporan keuangan yang lengkap sesuai dengan variabel penelitian. Hasil penelitian ini adalah aktiva pajak tangguhan tidak ada pengaruh signifikan atas manajemen laba. Perencanaan pajak ada pengaruh signifikan atas manajemen laba. Berdasarkan hasil penelitian tersebut terdapat keterbatasan penelitian yaitu, periode penelitian dilakukan hanya 3 tahun saja peneliti bisa menambah beberapa tahun periode agar dapat mencakup wawasan yang lebih luas lagi dan meningkatkan generalisasi hasil penelitian.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, bahwa penelitian pada Sari dan Sudjiman (2021) untuk mengukur aset pajak tangguhan menggunakan rumus selisih saldo aset pajak tangguhan periode t dengan saldo aset pajak tangguhan periode $t-1$ dibagi aset pajak tangguhan periode $t-1$, sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan rasio akuntansi dengan membagi aset pajak tangguhan dengan sales. Menurut *GMT Reasearch*, aset pajak tangguhan adalah item neraca yang relatif kecil, biasanya setara dengan kurang dari 2% dari penjualan, dengan menggunakan rumus ini akan melihat perbandingan persediaan, piutang, dan kas yang rata-rata 10-15% dari penjualan. Penulis tidak menggunakan rasio yang digunakan Sari dan Sudjiman (2021) untuk mengukur aset pajak tangguhan karena rumus yang digunakan lebih menunjukkan pertumbuhan aset pajak tangguhan dan hasil menjadi tidak dapat digeneralisasikan dengan baik.

Alasan dalam pemilihan variabel pada penelitian ini adalah peneliti ingin meneliti aset pajak tangguhan sebagai pengaruh manajemen laba karena penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sartika Sari dan Paul Eduard Sudjiman (2021) memiliki

hasil tidak ada pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan pada variabel perencanaan pajak ada pengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lutfi M Baradja, Yuswar Zainul Basri, Vertari Sasmi (2017), Lucy Citra Fitriany (2016), Titi Andrayani Fitriyani, M.Titan Terzaghi (2018), Neng Priski Yulianti, Endah Finatarian (2021), Septa Yulianah, Dwiyani Sudaryanti, Hariri (2021), Owen De Pinto Simanjuntak (2021), Yogi Maulana Putra (2019), Siti Aminah dan Zulaikha (2019), Noorjannah Vira Astuti, Rachmawati Meita Oktaviani (2021), Diah Vitaloka Adam, Nur Siti Faridah (2022) menyatakan bahwa aktiva pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatchan Achyani, Susi Lestari (2019), Sartika Sari Paul, Eduard Sudjiman (2021), Ainaul Maslihah (2019), Nunu Chahyani (2021), Fiqri Fadillah, Arief Tri Hardiyanto, Abdul Kohar (2021), Adibah Yahya, Dian Wahyuningsih (2019), Yuliana Maulida, Sri Hartiyah, Agus Putranto (2021), Tan Rachel Kalinda, Lilis Setyowati (2021) mengatakan bahwa aktiva pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lutfi M Baradja, Yuswar Zainul Basri, Vertari Sasmi (2017), Ratna Eka Puji Astutik, Titik Mildawati (2016), Lucy Citra Fitriany (2016), Sartika Sari Paul, Eduard Sudjiman (2021), Ainaul Maslihah (2019), Dita Rimbawati Dewi, Dian Anita Nuswantara (2021), Rima Dwi Yanti, Suciati Muanifah (2021), Novi Catur Prasetyo, Riana, Endang Masitoh (2019), Enong Muiz, Heni Ningsih (2018), Tan Rachel Kalinda, Lilis Setyowati (2021), Arma Yuliza dan Ronia Fitri (2020), Dea Savitri Ayu Lestari, Ia Kurnia, Yuniati (2018) Noorjannah

Vira Astuti, Rachmawati Meita Oktaviani (2021) mengatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fatchan Achyani, Susi Lestari (2019), Titi Andrayani Fitriasuri, M.Titan Terzaghi (2018), Budi Setyawan, Harnovinsah (2016), Neng Priski Yulianti, Endah Finatarian (2021), Nunu Chahyani (2021), Yogi Saputra (2018), Fiqri Fadillah, Arief Tri Hardiayanto, Abdul Kohar (2021), Septa Yulianah, Dwiyani Sudaryanti, Hariri (2021), Adibah Yahya, Dian Wahyuningsih (2019), Dewi Kusuma Wardani, Desifa Kurnia Santi (2018), Yuliana Maulida, Sri Hartiyah, Agus Putranto (2021), Yogi Maulana Putra (2019) mengatakan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Aset Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi pada Perusahaan Manufaktur Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2021).”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manajemen laba masih banyak terjadi dimana perusahaan mengatur labanya agar beban pajak yang dibayarkan rendah daripada yang seharusnya dibayarkan. Berbagai modus banyak dilakukan perusahaan untuk menghindari kewajiban pajaknya.

2. Penyebab praktik manajemen laba tersebut karena perusahaan ingin membayar pajak yang minimal dan untuk kepentingan pribadi.
3. Dampak yang terjadi dari praktik manajemen laba ini menyebabkan pembayaran pajak yang tidak maksimal dan kurangnya kualitas laba yang dihasilkan perusahaan.

1.2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, penulis mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aset pajak tangguhan pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2021.
2. Bagaimana perencanaan pajak pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2021.
3. Bagaimana manajemen laba pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2021.
4. Seberapa besar pengaruh aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2021.
5. Seberapa besar pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas penulis mengidentifikasi tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aset pajak tangguhan pada perusahaan industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2021.
2. Untuk mengetahui perencanaan pajak pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2021.
3. Untuk mengetahui manajemen laba pada perusahaan industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2021.
4. Untuk mengetahui besarnya aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2021.
5. Untuk mengetahui besarnya perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan memberi kontribusi teori serta memperluas ilmu pengetahuan mengenai pengaruh aset pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan industri barang konsumsi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberi tambahan

informasi, wawasan, referensi, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan teori baru atau referensi tambahan mengenai pengetahuan aset pajak tangguhan khususnya dalam jumlah pajak penghasilan (PPh) yang dapat dipulihkan pada periode masa depan akibat adanya akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan teori baru atau referensi tambahan mengenai pengetahuan perencanaan pajak khususnya dalam pengurangan beban pajak atau mengurangi pembayaran pajak.
3. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan teori baru atau referensi tambahan mengenai manajemen laba khususnya dalam pengembangan model matematis yang digunakan untuk mendeteksi manajemen laba.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak yang berkepentingan dan membutuhkan, baik secara langsung maupun tidak langsung diantaranya :

1. Bagi Penulis
 - a. Aset pajak tangguhan digunakan penulis untuk mengetahui jumlah pajak penghasilan (PPh) yang dapat dipulihkan pada periode masa depan akibat adanya akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan,

- b. Perencanaan pajak digunakan penulis untuk mengukur sejauh mana perusahaan mengurangi beban pajak atau mengurangi pembayaran pajaknya.
- c. Manajemen laba digunakan penulis untuk melihat berapa banyak perusahaan-perusahaan yang telah melakukan praktik manajemen laba.

2. Bagi Perusahaan

- a. Aktiva pajak tangguhan digunakan untuk mengetahui jumlah PPh terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.
- b. Perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.
- c. Manajemen laba digunakan agar keputusan ekonomi yang dibuat *stakeholder* atas dasar informasi yang terdapat dalam laporan keuangan menjadi lebih berkualitas.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2021. Untuk memperoleh informasi dan pengambilan data peneliti mengunjungi masing-masing website resmi perusahaan dan website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari tanggal disahkannya proposal yaitu tanggal 7 April 2022 hingga selesainya penelitian.